

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH

Luh Neliyanti

NIM. 2315664015

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG**

ABSTRAK

Luh Neliyanti

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan prinsip Good Government Governance, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Implementasi prinsip-prinsip ini berdampak positif pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, serta membantu mengurangi kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan dana. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

Kata Kunci: Good Government Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran, Pengelolaan Dana Desa.

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG**

ABSTRACT

Luh Neliayanti

The study aims to understand and analyze the application of the principles of Good Government Governance, in particular the principle of transparency, accountability, responsibility, independence, and responsibility in the management of village funds in the village of Sudaji. Data collection is done through observations, questionnaires, and interviews. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. The implementation of these principles has a positive impact on increased transparency, accountability, and efficiency in the management of village funds, as well as helping to reduce errors and deviations in the use of funds. The study provides important contributions to the development of better and more transparent policies and practices of village governance, and can be a reference for further research in the same field..

Keywords: Good Government Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Liability, Rural Fund Management.

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

Nama: Luh Neliayanti

NIM. 2315664015

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Surat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Neliayanti
NIM : 2315664015
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sudaji Kabupaten Buleleng

Pembimbing I : Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Pembimbing II : Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak

Tanggal Ujian : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Badung,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luh Neliayanti', is written over the text 'Badung,'.

Luh Neliayanti

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG**

DIAJUKAN OLEH :

Nama: Luh Neliyanti

NIM. 2315664015

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh :

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Arvaningsih, MM
NIP. 196809131993032002

PEMBIMBING II



Putu Rany Wedasuari, SE., M.Si., Ak
NIP. 202111001

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak
NIP : 197512312005011003

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUDAJI
KABUPATEN BULELENG**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 26 Agustus 2024

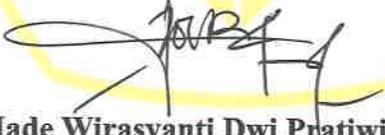
PANITIA PENGUJI

KETUA:



Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM
NIP. 196809131993032002

ANGGOTA:



2. Ni Made Wirasvanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, Ak
NIP. 198101152006042002



3. Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc.
NIP. 199510112022032015

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), sebab atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali. Setelah melalui berbagai tahapan, skripsi ini mampu terselesaikan berkat bimbingan, bantuan, semangat, motivasi, serta dorongan berbagai pihak. Maka sebab itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang senantiasa menghadirkan semangat guna menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
5. Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dorongan, doa serta motivasi hingga bisa sampai tahap ini.
8. Dewa Gede Ari Pradnyana yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman yang senantiasa melimpahkan semangat, dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan selama peneliti menuntaskan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu. Semoga ini mampu menghadirkan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi.

Penulis

Badung, 29 Juli 2024

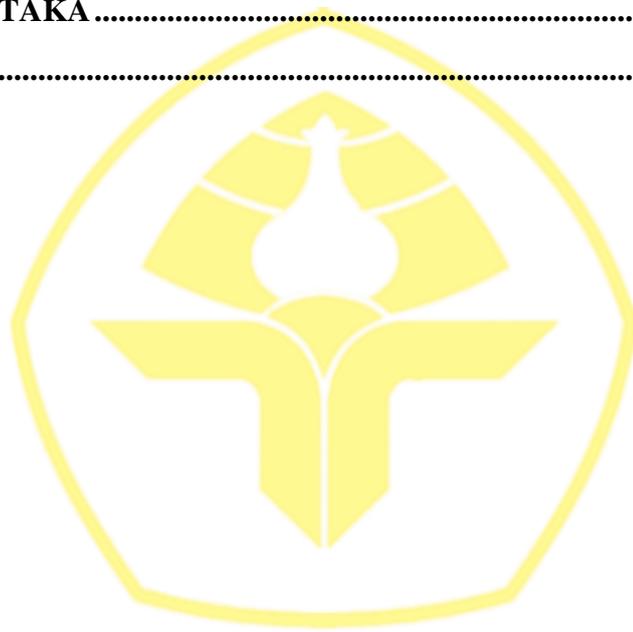


JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	19
D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
E. Keabsahan Data.....	30
F. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

B. Deskripsi Hasil Penelitian	36
C. Pembahasan.....	75
D. Keterbatasan Penelitian	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Implikasi.....	84
C. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89



JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aspek <i>Good Government Governance</i>	28
Tabel 3. 2 Aspek dalam Pengelolaan Desa	29
Tabel 3. 3 Aspek dalam Pengelolaan Desa	29
Tabel 4. 1 APBDes Pemerintah Desa Sudaji Tahun 2022	72
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Sudaji Tahun 2022	73
Tabel 4. 3 Hasil Penerapan Pinsip <i>Good Government Governance</i>	76



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

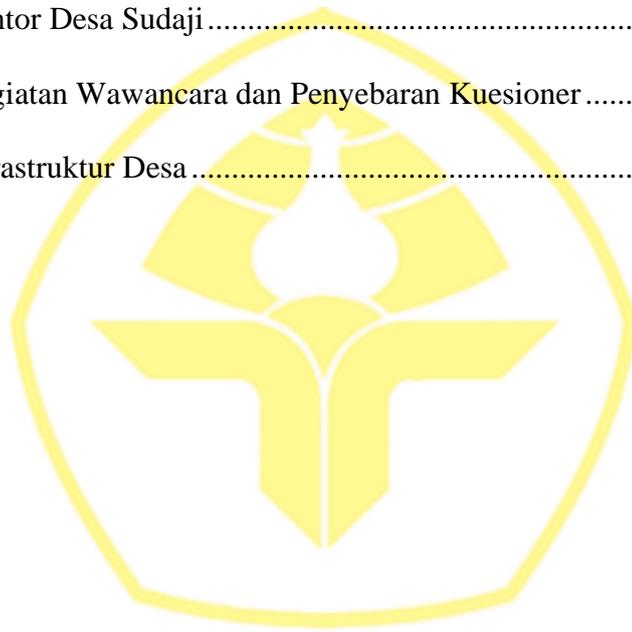
Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	21
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suddaji	34
Gambar 4. 2 Hasil Kuesioner Perencanaan.....	37
Gambar 4. 3 Hasil Kuesioner Pelaksanaan	38
Gambar 4. 4 Hasil Kuesioner Pertanggungjawaban	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data APBDesa Sudaji Tahun 2022	90
Lampiran 2 Kuesioner Tertutup	94
Lampiran 3 Kuesioner Terbuka	96
Lampiran 4 Spanduk Hasil Pertanggungjawaban APBDesa	100
Lampiran 5 Kantor Desa Sudaji	101
Lampiran 6 Kegiatan Wawancara dan Penyebaran Kuesioner	103
Lampiran 7 Infrastruktur Desa	104



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyerahkan kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengelola kepentingannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai desentralisasi. Ini memungkinkan kepala daerah untuk dapat mengelola proses pembangunan dengan lebih baik, termasuk perencanaan yang lebih harmonis. Khusus dalam hal keuangan, setiap bentuk pengelolaan dan pengalokasian anggaran harus dikerjakan oleh administrasi desa dengan bijaksana dan dengan maksimal, termasuk sumber dana yang berasal dari penerimaan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. (Zaman & Nurdiwaty, 2020)

Pemerintahan yang berintegritas adalah kunci utama untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam mencapai cita-cita setiap daerah. Praktik pemerintahan yang baik menjadi penanda terjadinya proses demokratisasi yang berfungsi sebagai pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, pembangunan wilayah dalam suatu negara perlu mendapat dukungan secara moral dan material dari pemerintah pusat, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Zaman & Nurdiwaty, 2020a)

Penelitian yang dilakukan oleh (Mufti Rahajeng, 2021) dijelaskan bahwa sebelum adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemerintah

desa mengalami sejumlah polemik atau masalah seperti ketimpangan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah desa karena pembangunan tersebut belum dilakukan secara mandiri. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Beberapa masalah yang dihadapi meliputi penggunaan dana desa di luar ketetapan dan rencana yang utama, dengan kurangnya bukti yang memadai untuk pengeluaran dana desa, dan juga pekerjaan yang seharusnya diutamakan untuk swakelola malah diemban oleh pihak ketiga. Tanpa implementasi prinsip *good government governance* dalam otonomi daerah, tidak akan terjadi tata pemerintahan kelola yang baik. Prinsip *good government governance* mencakup akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, serta fairness. Melalui penerapan prinsip ini, pengelolaan dana desa dengan terperinci dijabarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan harapan dapat mewujudkan tata laksana pemerintahan yang berkualitas. (Rustiarini & Denpasar, 2016)

Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng, Bali, terdiri dari sepuluh banjar dinas. Dana yang dialokasikan dalam APBDes dimanfaatkan untuk pemugaran Desa Sudaji dengan tujuan kemakmuran warga desa serta mendorong kemandirian desa dalam mengelola dana desa. APBDes disetujui melalui Rapat Musyawarah Bersama yang didampingi oleh Perbekel Desa Sudaji, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pengurus desa. APBDes Desa Sudaji untuk tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

TABEL 1.1
APBDes Pemerintah Desa Sudaji Tahun 2022

No	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	2.624.952.473,34
2	Belanja	3.037.388.501,63
3	Penerimaan Pembiayaan	417.436.028,00

Sumber: APBDes Sudaji (2022)

Pembuatan APBDes oleh pemerintah desa yang seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan. Hal ini yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan realisasi APBDes Desa Sudaji Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

TABEL 1.2
Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Sudaji Tahun 2022

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.571.660.893,92
2	Belanja	2.616.236.215,00
3	Penerimaan Pembiayaan	417.436.028,00

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Sudaji (2022)

Permasalahan dalam pengelolaan dana desa ini membuktikan bahwa pentingnya *good government governance* dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan perlunya tata kelola keuangan desa yang baik. Rustiarini (2016) dalam (Mufti Rahajeng, 2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan dengan adanya prinsip *good government governance* yang telah diterapkan di banyak kantor desa telah membawa dampak positif yang signifikan pada tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap bidang pemerintahan, mencakup bidang fiskan publik di tingkat desa, untuk

menerapkan prinsip *good government governance* dengan memperhitungkan strategi pemerintah.

Gagasan *good government governance* dalam pemerintahan desa dijadikan sebagai landasan berbasis institusi guna memperkuat kemandirian desa. Kekuatan otonom otoritas wilayah di tingkat desa takkan efektif dan tidak akan memberikan manfaat tanpa adanya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness (kewajaran). Prinsip-prinsip *good government governance* ini diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa (Zaman & Nurdiwaty, 2020b).

Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka diperlukan penelitian tentang penerapan prinsip *Good Government Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa yang terdapat Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan sumber persoalan yang dijelaskan, maka adapun kajian masalah pada kajian ini yaitu bagaimanakah penerapan *good government governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji ?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, pembatasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu pada subjek penelitiannya dimana pada aspek akuntansi publik yang berfokus pada pemerintahan di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip *good government governance* terkait dengan pengelolaan dana APBDes Desa Sudaji.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga sasaran dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan *good government governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber data dan menjadi referensi untuk studi berikutnya terhadap penerapan prinsip *good government governance* di pemerintah Desa.

b. Manfaat Praktis

a. Peneliti

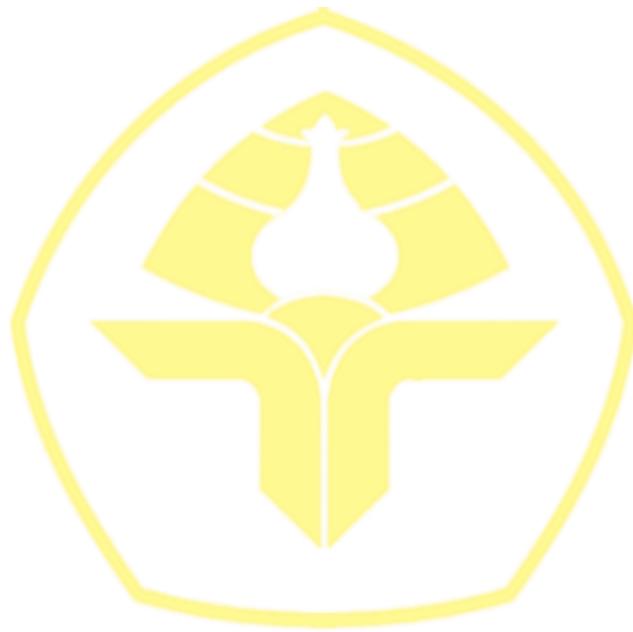
Mengetahui secara jelas mengenai penerapan prinsip *good government governance* dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang terdapat Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali.

b. Institusi Politeknik Negeri Bali

Sebagai sumber referensi perpustakaan untuk Politeknik Negeri Bali serta dapat memperluas wawasan dan data bagi pembaca, terutama mahasiswa program studi akuntansi, yang akan melakukan penelitian topik serupa terkait prinsip-prinsip *good government governance*.

c. Pemerintah Desa Sudaji

Hasil penelitian Sebagai input dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Desa Sudaji dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip good government governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sudaji. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Walaupun prinsip transparansi awalnya terdapat perbedaan pendapat pada kuesioner namun secara umum pemerintah desa telah menerapkan seluruh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi mendapat apresiasi positif. Lalu, pada tahap pertanggungjawaban, laporan penggunaan dana desa telah disajikan dengan jelas dan terbuka, sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa penerapan prinsip good government governance telah berkontribusi positif terhadap efisiensi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

B. Implikasi

1. Pemerintah Desa

Hasil kajian ini menunjukkan dampak bagi pengelola desa guna memajukan dan memaksimalkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bekerja, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif

dan efisien. Selain itu, dalam penerapannya diperlukan komitmen dari setiap perangkat desa dengan tujuan mengurangi resiko kecurangan di lingkungan pemerintahan desa yang dapat menimbulkan persepsi keraguan dan mempengaruhi keyakinan public dan kepercayaan sosial terhadap pemerintah desa.

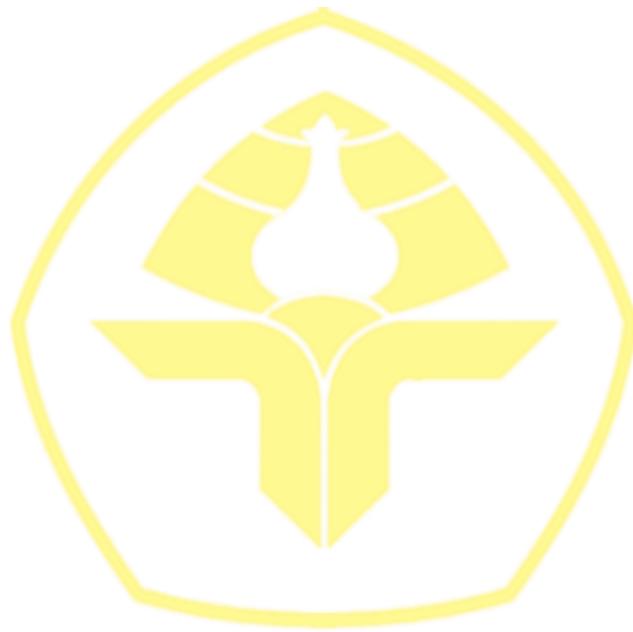
2. Masyarakat

Output penelitian ini guna memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam memantau dan mengendalikan program serta regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah, dengan begitu akan menghasilkan kinerja pemerintah desa yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa

C. Saran

1. Pengelolaan dana desa di Desa Sudaji telah melaksanakan prinsip - prinsip *good government governance*, namun sesuai dengan hasil kuesioner bahwasannya beberapa masyarakat tidak mengetahui mengenai proses perencanaan penggunaan dana desa, sehingga dengan hal ini pemerintah desa masih perlu lebih mengoptimalkan dalam penyebaran informasi proses perencanaan penggunaan dana desa agar masyarakat mengetahui secara jelas perencanaan penggunaan dana desa tersebut sehingga tidak terjadinya miskomunikasi dan kecurigaan dari masyarakat. Di samping itu, sinergi antar aparat desa perlu dipertingkat guna mengoptimalkan terwujudnya pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi meningkatkan kesejahteraan warga desa.

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan membahas setiap komponen APBDesa secara rinci, detail, dan mendalam. Disarankan juga guna menambah jumlah informan agar bisa menilai dengan lebih tepat tentang asas-asas pengelolaan pemerintahan yang baik. dalam pengelolaan APBDesa.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

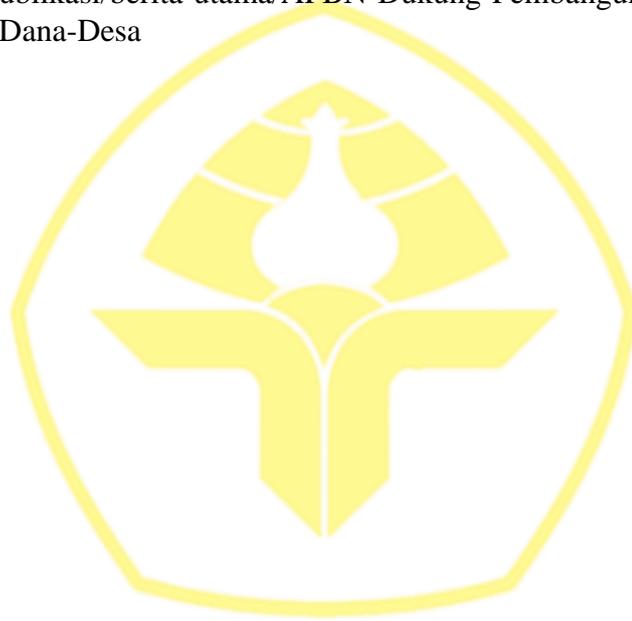
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2798–8961, 334–344. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/3479>
- Diana, W. (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Mariana, L., Informatika, P., & Makassar, N. (2020). *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat*. 2, 38–52.
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Mustaram, R. A., Sudyarti, N., & Kumala, Z. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(1), 68–77.
- Nurisna, & Sahade. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh Good Government Governance dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal IMAGINE*, 3(1), 1–11. <https://jurnal.std-bali.ac.id/index.php/imagine>
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020a). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung,

Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65–84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>

Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020b). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(1), 65–84. <https://doi.org/10.51289/peta.v5i1.419>

Sudahi, D. (2022). *Informasi Desa Sudaji*. Diambil kembali dari Desa Sudaji: <https://sudaji-buleleng.desa.id/index.php/first>

KemenKeu. (2024). *Dana Desa*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Dukung-Pembangunan-Daerah-melalui-Dana-Desa>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI